

Peran Organisasi Muhammadiyah Pada Masa Mempertahankan Kemerdekaan di Sulawesi Selatan

Muh. Akbar¹, Rufer Firma Harianja², Rusmala Dewi Kabubu³

¹²Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

³⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

muhakbar@unima.ac.id¹, ruferfirma@unima.ac.id², rusmala.dewi.kabubu@unm.ac.id³.

Korespondensi: muhakbar@unima.ac.id

Abstrak

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta menghadirkan stabilitas, melainkan memunculkan serangkaian tantangan berat berupa ancaman kolonialisme yang kembali hadir dan gejolak separatisme internal. Dalam konteks tersebut, peran organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan menjadi sangat strategis, namun kajian akademik tentang kontribusi Muhammadiyah di tingkat daerah khususnya Sulawesi Selatan masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara historis peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mencakup dimensi perjuangan bersenjata, diplomasi politik, pemberdayaan sosial, serta peran tokoh-tokoh kuncinya. Penelitian menggunakan pendekatan historis dengan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen arsip, sumber primer organisasi, surat kabar sezaman, wawancara dengan tokoh dan saksi sejarah, serta berbagai sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah Sulawesi Selatan memainkan peran multidimensional yang signifikan. Secara kelembagaan, organisasi ini hadir sejak 1926 dan membangun jaringan kader yang solid di berbagai daerah. Dalam perjuangan bersenjata, kader-kadernya aktif terlibat dalam laskar pejuang dan ulama-ulamanya mengeluarkan fatwa jihad yang berdampak besar terhadap mobilisasi massa. Melalui jalur diplomasi, tokoh-tokoh Muhammadiyah menerapkan strategi *struggle from within* dalam menghadapi pembentukan Negara Indonesia Timur. Selain itu, jaringan amal usaha berupa sekolah, klinik, dan masjid berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang menopang keberlanjutan perjuangan. Muhammadiyah Sulawesi Selatan bukan sekadar aktor pinggiran, melainkan kekuatan utama yang berkontribusi nyata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan meninggalkan warisan kelembagaan, nilai, dan epistemologis yang relevan hingga era kontemporer.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Sulawesi Selatan, Kemerdekaan Indonesia

Abstract

The proclamation of Indonesian independence on August 17, 1945, did not immediately bring stability, but instead gave rise to a series of serious challenges in the form of the threat of resurgent colonialism and internal separatist unrest. In this context, the role of religious-based community organizations became very strategic, but academic studies on Muhammadiyah's contribution at the regional level particularly in South

Sulawesi remain very limited. This study aims to examine the historical role of Muhammadiyah in South Sulawesi in maintaining Indonesian independence, encompassing the dimensions of armed struggle, political diplomacy, social empowerment, and the roles of its key figures. The study uses a historical approach with historical research methods that include four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through the study of archival documents, primary organizational sources, contemporary newspapers, interviews with historical figures and witnesses, and various secondary sources in the form of books and scientific journal articles. The results show that Muhammadiyah in South Sulawesi plays a significant multidimensional role. Institutionally, this organization has been present since 1926 and has built a solid network of cadres in various regions. During the armed struggle, its cadres were actively involved in the fighters' militias, and its ulama issued fatwas (religious edicts) for jihad, which had a significant impact on mass mobilization. Through diplomacy, Muhammadiyah figures implemented a strategy of struggle from within in confronting the formation of the State of East Indonesia. Furthermore, a network of charitable organizations, including schools, clinics, and mosques, served as social infrastructure that supported the ongoing struggle. Muhammadiyah in South Sulawesi was not merely a peripheral actor, but a major force that contributed significantly to maintaining Indonesian independence, leaving behind an institutional, value, and epistemological legacy that remains relevant to the contemporary era.

Keywords: Muhammadiyah, South Sulawesi, Indonesian Independence

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta menghadirkan stabilitas politik dan keamanan yang diharapkan. Bangsa Indonesia justru menghadapi serangkaian tantangan berat, baik dari ancaman eksternal maupun gejolak internal, yang memerlukan respons kolektif dari seluruh elemen bangsa. Dari sisi eksternal, kedatangan pasukan Sekutu ke Surabaya pada 25 Oktober 1945 memicu pertempuran besar pada 27 Oktober 1945, yang kemudian meluas ke berbagai daerah dalam bentuk peristiwa Bandung Lautan Api, Pertempuran Ambarawa, hingga Serangan Umum 1 Maret 1949 (Aman, 2015). Sementara itu, perjuangan diplomasi juga ditempuh melalui Perjanjian Linggarjati (15 November 1946), Perjanjian Renville (17 Januari 1948), Perjanjian Roem-Royen (14 April 1949), hingga Konferensi Meja Bundar (23 Agustus - 2 November 1949) (Ricklefs, 2018).

Dari sisi internal, berbagai aksi pemberontakan mengancam integritas negara yang baru lahir. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948, gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), serta berbagai upaya separatisme di sejumlah daerah menjadi ujian bagi ketahanan

Republik Indonesia (Nasir, 2016). Dalam konteks yang demikian kompleks itulah peran organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah, menjadi sangat strategis dan tidak dapat diabaikan dalam narasi sejarah perjuangan bangsa. Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, merupakan salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua di Indonesia yang telah memainkan peran monumental dalam dinamika kebangsaan Indonesia (Mulkhan, 2010). Sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, Muhammadiyah tidak hanya berkontribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial-keagamaan, tetapi juga tampil sebagai kekuatan aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan (Ahmad Najib Burhani, 2016). Kontribusi tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Jenderal Sudirman dalam perang gerilya, Ki Bagus Hadikusumo dalam kepemimpinan Askar Perang Sabil (APS), Ir. Djuanda melalui Deklarasi Djuanda 1957, serta KH Abu Dardiri sebagai penggagas Kementerian Agama, merupakan bukti nyata bahwa Muhammadiyah adalah pilar penting dalam pembangunan negara-bangsa Indonesia ((Musthafa Kamal, 2009).

Meskipun peran nasional Muhammadiyah telah cukup banyak dikaji, kontribusi Muhammadiyah di tingkat daerah khususnya di Sulawesi Selatan masih sangat minim mendapat perhatian ilmiah yang memadai. Padahal, Muhammadiyah telah hadir di Sulawesi Selatan jauh sebelum kemerdekaan dan memiliki jaringan kader yang kuat di wilayah tersebut. Minimnya kajian akademik yang membahas peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan menjadi celah historiografis yang perlu segera diisi, mengingat pentingnya Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah strategis dalam peta perjuangan kemerdekaan Indonesia di kawasan timur (Syaifullah, M., & Hamid, 2020).

Kajian ini bertumpu pada beberapa kerangka teoritik yang saling melengkapi. Teori peran sosial (*social role theory*) yang dikembangkan dalam perspektif sosiologi organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa setiap organisasi dalam masyarakat menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang ditentukan oleh nilai, misi, dan kapasitas kelembagaannya (Nasir, 2016). Dalam konteks ini, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan menjalankan peran

multidimensional yang mencakup dimensi spiritual, sosial, pendidikan, dan politik dalam kerangka dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sejak didirikannya Muhammadiyah pada 18 November 1912 telah memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Berbagai kader dan tokoh Muhammadiyah juga memainkan peranan penting dalam memimpin berbagai perlawanan, baik di jalur diplomasi maupun konfrontasi bersenjata. Melihat hal ini, peneliti kemudian ingin lanjut mengetahui terkait peranan Muhammadiyah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di daerah, yaitu di Sulawesi Selatan. Muhammadiyah telah berkembang di Sulawesi Selatan sebelum kemerdekaan Indonesia tentunya juga memiliki peranan dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia.

Penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilakukan sebagai suatu upaya untuk menambah pengetahuan terkait peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Penelitian ini penting mengingat Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi yang memiliki peranan besar dalam sejarah Negara Republik Indonesia. Judul penelitian ini dipilih mengingat masih minimnya penelitian yang membahas terkait topik ini. Beberapa penelitian terdahulu telah ada, namun penelitian ini dilakukan untuk lebih mengkaji lebih jauh terkait peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan metode penelitian sejarah (*historical research method*) yang mencakup empat tahapan sistematis: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018). Pada tahap heuristik, data dikumpulkan melalui studi dokumen arsip, sumber primer berupa dokumen organisasi Muhammadiyah Sulawesi Selatan, surat kabar sezaman, serta wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh dan saksi sejarah yang masih dapat dijangkau. Pada tahap kritik sumber, seluruh data diverifikasi secara internal dan eksternal untuk memastikan otentisitas dan kredibilitasnya. Selanjutnya, interpretasi dilakukan secara analitis-kritis untuk menemukan makna

dan kausalitas dari fakta-fakta historis yang ditemukan, sebelum akhirnya disusun menjadi narasi historiografi yang kohesif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain sumber primer, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan guna memperkuat analisis dan kontekstualisasi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran dan Perkembangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan

Muhammadiyah pertama kali masuk ke Sulawesi Selatan pada dekade 1920-an, seiring dengan intensifnya mobilitas para pedagang, ulama, dan intelektual Muslim dari Jawa yang menjalin hubungan dengan masyarakat Bugis-Makassar melalui jalur perdagangan antarpulau. Kehadiran Muhammadiyah di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-kultural masyarakat Bugis-Makassar yang memiliki tradisi keislaman yang kuat dan mengakar, yang dikenal dengan konsep *siri' na pace* sebuah nilai budaya yang menempatkan kehormatan, martabat, dan solidaritas sebagai prinsip hidup tertinggi (Syaifullah, M., & Hamid, 2020). Nilai-nilai ini secara organik berpadu dengan semangat dakwah Muhammadiyah, sehingga organisasi ini mampu tumbuh dengan pesat dan mendapatkan penerimaan yang luas di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pada tahun 1926, cabang Muhammadiyah resmi berdiri di Makassar, menjadikannya salah satu cabang tertua di luar Pulau Jawa (Ilham Hamid, 2015). Keberadaan cabang ini menjadi pusat gerakan pembaruan Islam yang secara progresif menyentuh bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial masyarakat (Ilham Hamid, 2015). Melalui pendirian sekolah-sekolah modern yang mengintegrasikan kurikulum agama dan ilmu umum, Muhammadiyah Sulawesi Selatan berhasil melahirkan generasi terdidik yang kelak menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan di wilayah tersebut (Mustrari Bosra, 2015). Ekspansi organisasi ini kemudian merambah ke berbagai daerah di luar Makassar, termasuk Bone, Pare-Pare, Bulukumba, Jeneponto, hingga wilayah Tana Toraja, membentuk jaringan kader yang solid dan terorganisir secara kelembagaan (Darmawijaya & Irwan Abbas, 2012).

Berdasarkan penelusuran historis yang dilakukan dalam kajian ini, penulis menemukan bahwa masuknya Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan pada dekade 1920-an tidak bersifat kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi logis dari intensifnya arus mobilitas sosial antar-pulau yang melibatkan pedagang, ulama, dan kaum intelektual Muslim dari Jawa. Penulis menginterpretasikan fenomena ini sebagai bagian dari dinamika jaringan Islam nusantara yang pada masa itu sedang mengalami penguatan secara organik melalui jalur-jalur perdagangan maritim. Merujuk pada kajian Syaifullah dan Hamid (2020) serta (Mustari Bosra, 2015), penulis menyimpulkan bahwa ekspansi kelembagaan Muhammadiyah ke berbagai daerah seperti Bone, Pare-Pare, Bulukumba, Jeneponto, hingga Tana Toraja mencerminkan kematangan organisasional yang memungkinkan pembentukan jaringan kader yang solid jauh sebelum era kemerdekaan.

Peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Perjuangan Bersenjata

Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, respons masyarakat Sulawesi Selatan terhadap berita kemerdekaan berlangsung dalam suasana penuh ketegangan, mengingat wilayah ini masih berada di bawah pendudukan militer Jepang yang belum sepenuhnya berakhir. Ketika pasukan Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) kembali memasuki wilayah Sulawesi Selatan pada akhir 1945 dengan misi memulihkan kekuasaan kolonial Belanda, perlawanan rakyat pun berkobar secara masif (Mappangara, 2018).

Muhammadiyah Sulawesi Selatan tampil sebagai salah satu kekuatan penggerak perlawanan tersebut. Para kader dan tokoh Muhammadiyah aktif memobilisasi massa, menyediakan jaringan logistik, serta memberikan legitimasi moral dan spiritual bagi perjuangan bersenjata yang berlangsung. Ulama-ulama Muhammadiyah mengeluarkan fatwa jihad yang menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan adalah kewajiban agama yang tidak dapat ditawar (Faisal Ismail, 2020). Fatwa ini memiliki dampak psikologis dan motivasional yang sangat besar bagi para pejuang, terutama di kalangan pemuda Muslim yang menjadi lapis terdepan perlawanan bersenjata.

Salah satu manifestasi konkret dari peran ini adalah keterlibatan aktif kader-kader muda Muhammadiyah dalam berbagai laskar pejuang yang terbentuk di Sulawesi Selatan, seperti Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi

(LAPRIS) yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo. Meskipun LAPRIS bukan organisasi eksklusif Muhammadiyah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kader-kader Muhammadiyah memberikan kontribusi signifikan dalam hal penguatan semangat juang, rekrutmen anggota, dan pengorganisasian perlawanan di berbagai titik strategis (Pelu, I. E. A., & Wahab, 2022). Pertempuran di wilayah Makassar, Gowa, Maros, dan Bone menjadi arena di mana keterlibatan kader Muhammadiyah tercatat dalam berbagai dokumen sejarah lokal.

Dalam mengkaji dimensi perjuangan bersenjata, penulis berargumen bahwa peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan pasca-proklamasi 1945 tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan substansial dan terstruktur secara organisasional. Penulis mengidentifikasi setidaknya tiga kontribusi utama yang dapat diverifikasi melalui berbagai sumber primer dan sekunder: mobilisasi massa, penyediaan jaringan logistik, serta pemberian legitimasi moral dan spiritual melalui fatwa jihad. Merujuk pada Ismail (2020), penulis menegaskan bahwa fatwa jihad yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Muhammadiyah memiliki signifikansi yang melampaui dimensi keagamaan semata. Selain itu, penulis menemukan bukti keterlibatan kader-kader Muhammadiyah dalam laskar pejuang seperti LAPRIS yang dipimpin Ranggong Daeng Romo. Sebagaimana didokumentasikan oleh Pelu dan Wahab (2022), kontribusi kader Muhammadiyah dalam LAPRIS walaupun bukan dalam kapasitas institusional eksklusif mencakup penguatan semangat juang, rekrutmen anggota, dan pengorganisasian perlawanan di titik-titik strategis. Berdasarkan interpretasi penulis, pola keterlibatan seperti ini justru mencerminkan fleksibilitas strategis Muhammadiyah yang mampu bergerak secara efektif di dalam maupun di luar batas organisasionalnya.

Penulis juga memberikan perhatian khusus terhadap sikap Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemberontakan Andi Azis pada April 1950. Dengan merujuk pada Mappangara (2018), penulis menyimpulkan bahwa posisi tegas Muhammadiyah dalam membela integritas Republik Indonesia dari gerakan separatisme merupakan manifestasi nyata dari komitmen kebangsaan organisasi ini yang melampaui kepentingan kelompok.

Peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui Jalur Diplomasi dan Politik

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu berlangsung di medan perang. Muhammadiyah Sulawesi Selatan juga memainkan peran yang sangat strategis melalui jalur diplomasi dan politik. Tokoh-tokoh Muhammadiyah di Sulawesi Selatan aktif terlibat dalam berbagai forum negosiasi dan komunikasi politik yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia di hadapan tekanan kolonial Belanda (Mustrari Bosra, 2015). Dalam konteks pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) yang diproklamasikan pada Desember 1946 sebagai bagian dari strategi federal Belanda, tokoh-tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengambil sikap yang sangat hati-hati dan kritis. Mereka tidak serta-merta menolak NIT secara frontal mengingat realitas politik yang tidak memungkinkan tetapi secara konsisten menggunakan forum-forum politik yang tersedia untuk memperjuangkan agar NIT pada akhirnya dapat bergabung dengan Republik Indonesia (Pelu, I. E. A., & Wahab, 2022). Strategi perjuangan dari dalam (*struggle from within*) ini mencerminkan kecerdasan politik dan kematangan taktis yang menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah (Nasir, 2016).

Peran Muhammadiyah dalam jalur politik juga termanifestasi melalui keterlibatan tokoh-tokohnya dalam Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang menjadi wadah politik resmi umat Islam Indonesia pada masa itu (Amri, 2024). Di Sulawesi Selatan, Masyumi dengan basis kader Muhammadiyah yang kuat menjadi kekuatan politik signifikan yang secara konsisten memperjuangkan agenda pengembalian kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia (Ahmad Najib Burhani, 2016). Dalam perspektif analitis penulis, kajian tentang perjuangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan akan bersifat tidak lengkap apabila hanya difokuskan pada dimensi militer. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jalur diplomasi dan politik justru merupakan arena di mana kecerdasan taktis Muhammadiyah paling jelas termanifestasi.

Penulis secara khusus tertarik mengkaji sikap Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam konteks pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) pada Desember 1946. Berbeda dengan narasi perjuangan yang cenderung bersifat hitam-putih, penulis berargumen mengacu pada Pelu dan Wahab (2022) serta Nashir (2019) bahwa strategi *struggle from within* yang ditempuh tokoh-tokoh Muhammadiyah mencerminkan kematangan politik yang jarang diapresiasi dalam

literatur sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Alih-alih konfrontasi frontal yang kontraproduktif, mereka memilih menggunakan forum-forum yang tersedia secara legal untuk mengarahkan NIT agar bergabung dengan Republik Indonesia. Penulis juga mengidentifikasi peran penting jaringan Masyumi yang berbasis kader Muhammadiyah sebagai kekuatan politik yang secara konsisten memperjuangkan agenda kedaulatan penuh. Mengacu pada Ismail (2020) dan Burhani (2016), penulis menyimpulkan bahwa pada masa ini Muhammadiyah Sulawesi Selatan berhasil menjembatani antara perjuangan Islam dan perjuangan nasional, sebuah sintesis yang tidak selalu mudah dicapai dalam konteks perpolitikan Indonesia pada dekade pertama kemerdekaan.

Peran Tokoh-Tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Kajian historis tentang peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang tokoh-tokoh kunci yang menjadi motor penggerak perjuangan. Beberapa figur penting perlu mendapat sorotan akademik yang lebih serius. Pertama, Andi Pangeran Pettarani, seorang tokoh yang memiliki afiliasi dengan gerakan keislaman di Sulawesi Selatan, memainkan peran penting dalam menghubungkan elemen-elemen perjuangan di tingkat lokal dengan kerangka nasional (Hamid & Madjid, 2020). Kedua, para ulama Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah Bone, Pare-Pare, Bulukumba berfungsi sebagai pemimpin moral yang memberikan landasan spiritual bagi perlawanan rakyat. Otoritas moral ulama dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar yang religius sangat menentukan dalam memobilisasi massa dan mempertahankan semangat juang di tengah tekanan militer yang berat (Muhrari Bosra, 2015). Ketiga, para guru dan pendidik Muhammadiyah yang mengelola sekolah-sekolah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan memainkan peran yang sering kali tersembunyi namun sangat vital: menanamkan kesadaran kebangsaan dan semangat kemerdekaan kepada generasi muda melalui proses pendidikan yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas formal (Mulkhan, 2010). Sekolah-sekolah Muhammadiyah bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi ruang persemaian ideologi perjuangan dan rekrutmen kader-kader pejuang kemerdekaan.

Penulis berpendapat bahwa kajian terhadap tokoh-tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan perlu mendekati subjeknya secara lebih bernuansa, menghindari tendensi glorifikasi yang tidak produktif secara akademik. Dalam kajian ini, penulis mengklasifikasikan tokoh-tokoh kunci Muhammadiyah Sulawesi Selatan ke dalam tiga tipologi peran berdasarkan temuan penelitian. *Pertama*, para ulama yang tersebar di berbagai daerah dan berfungsi sebagai otoritas moral di akar rumput sebuah peran yang menurut penulis sangat krusial dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar yang sangat menghormati figur keagamaan. *Kedua*, para pendidik dan guru Muhammadiyah yang perannya sering kali tersembunyi namun justru bersifat jangka panjang, yakni dalam menanamkan kesadaran kebangsaan kepada generasi muda melalui institusi pendidikan. Penulis secara khusus menekankan signifikansi tipologi ketiga ini. Mengacu pada (Mulkhan, 2010) penulis menginterpretasikan sekolah-sekolah Muhammadiyah bukan semata sebagai lembaga pendidikan konvensional, melainkan sebagai ruang persemaian ideologi kemerdekaan yang dampaknya baru sepenuhnya dirasakan pada generasi-generasi berikutnya.

Kontribusi Kelembagaan Muhammadiyah dalam Penguatan Basis Sosial Perjuangan

Keterlibatan langsung dalam aksi militer dan politik, kontribusi Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang tidak kalah signifikan adalah dalam penguatan basis sosial perjuangan kemerdekaan. Jaringan amal usaha Muhammadiyah yang mencakup sekolah, klinik kesehatan, dan majelis taklim berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang mendukung keberlanjutan perjuangan (Musthafa Kamal, 2009). Sekolah-sekolah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, meskipun menghadapi berbagai tekanan dan keterbatasan selama masa pendudukan, terus beroperasi dan menjadi basis penyebaran kesadaran nasionalisme Islam (*Islamic nationalism*) yang mempertemukan semangat keislaman dengan cita-cita kemerdekaan nasional (Ricklefs, 2018). Pola pendidikan Muhammadiyah yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan intelektual terbukti efektif dalam melahirkan kader-kader yang memiliki komitmen ganda: kepada agama Islam dan kepada bangsa Indonesia.

Selain itu, jaringan masjid dan mushola yang berada di bawah pembinaan Muhammadiyah berfungsi sebagai pusat konsolidasi perjuangan di tingkat komunitas. Khutbah-khutbah Jumat dan pengajian yang diselenggarakan oleh ulama Muhammadiyah secara rutin menjadi media komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi, membangun solidaritas, dan memperkuat tekad perjuangan di tengah masyarakat (Faisal Ismail, 2020). Salah satu keunikan kontribusi Muhammadiyah Sulawesi Selatan terletak pada kemampuannya membangun dan mempertahankan infrastruktur sosial di tengah kondisi darurat perang. Jaringan amal usaha yang mencakup sekolah, klinik, dan majelis taklim tidak sekadar berfungsi sebagai layanan sosial, melainkan sebagai penopang material dan spiritual keberlanjutan perjuangan, sebagaimana diargumentasikan oleh Pasha dan Darban (2009).

Konsep *Islamic nationalism* yang dikembangkan melalui institusi pendidikan Muhammadiyah merepresentasikan sebuah sintesis ideologis yang sangat relevan dikaji dalam konteks sejarah intelektual Indonesia. Merujuk pada Burhani (2016) dan Ricklefs (2018), penulis menyimpulkan bahwa model pendidikan Muhammadiyah yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan intelektual terbukti mampu menghasilkan kader-kader dengan loyalitas ganda yang saling menguatkan: kepada Islam dan kepada bangsa Indonesia. Lebih lanjut, fungsi masjid dan mushola binaan Muhammadiyah sebagai infrastruktur komunikasi perjuangan di tingkat komunitas. Temuan ini, yang didukung oleh Ismail (2020) dan Syaifullah serta Hamid (2020), mendorong penulis untuk menawarkan konsep "masjid sebagai ruang perlawanan" sebagai kategori analitis yang dapat memperkaya pemahaman tentang peran institusi keagamaan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Warisan dan Dampak Jangka Panjang Perjuangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan

Perjuangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan meninggalkan warisan yang sangat berharga dan dampak jangka panjang yang dirasakan hingga era kontemporer. Pertama, warisan kelembagaan berupa jaringan amal usaha pendidikan dan kesehatan yang terus berkembang dan kini menjadi salah satu penyedia layanan publik terbesar di Sulawesi Selatan

(Handisaputra, Damayanti & Quraisy, Hidayah, 2022). Universitas Muhammadiyah Makassar, berbagai rumah sakit, dan ratusan sekolah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan merupakan buah langsung dari benih yang ditanam oleh generasi pejuang Muhammadiyah pada masa kemerdekaan (Ilham Hamid, 2015). Kedua, warisan nilai berupa budaya perjuangan, kemandirian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi DNA gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan hingga hari ini (Pelu, I. E. A., & Wahab, 2022). Semangat *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi landasan perjuangan para pendahulu terus diwariskan dan diaktualisasikan oleh generasi kader Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam konteks tantangan zaman yang berbeda. Ketiga, kontribusi perjuangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan dapat memainkan peran yang sangat strategis dalam momen-momen kritis sejarah bangsa bukan sebagai aktor pinggiran, melainkan sebagai kekuatan utama yang menentukan arah dan hasil dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri (Ahmad Najib Burhani, 2016). Pemahaman atas warisan historis ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia kontemporer yang terus membutuhkan peran konstruktif organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan nasional.

Berdasarkan keseluruhan temuan yang telah dipaparkan, Warisan perjuangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi yang saling berkaitan. *Pertama*, dimensi kelembagaan, yang terwujud dalam jaringan amal usaha pendidikan dan kesehatan yang kini menjadi salah satu penyedia layanan publik terbesar di Sulawesi Selatan. Penulis melihat Universitas Muhammadiyah Makassar dan berbagai institusi turunannya sebagai bukti konkret dari kontinuitas antara perjuangan masa kemerdekaan dan pembangunan masyarakat sipil di era kontemporer, sebagaimana dicatat oleh (Ilham Hamid, 2015). *Kedua*, dimensi nilai, yang mencakup budaya perjuangan, kemandirian, dan pengabdian sosial yang menjadi identitas gerakan Muhammadiyah Sulawesi Selatan hingga hari ini. Penulis menginterpretasikan pelestarian semangat *amar ma'ruf nahi munkar* bukan sebagai konservatisme ideologis, melainkan sebagai ekspresi kematangan organisasional dalam Nashir (2016) dan Pelu serta Wahab

(2022). *Ketiga*, dimensi epistemologis, di mana penulis berargumen bahwa studi tentang Muhammadiyah Sulawesi Selatan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan dapat menjadi aktor utama bukan marginal dalam momen-momen kritis sejarah bangsa.

SIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengungkap secara komprehensif bahwa peran Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia jauh melampaui apa yang selama ini terekam dalam narasi historiografi arus utama.

1. Keberhasilan Muhammadiyah mengakar di Sulawesi Selatan sejak dekade 1920-an merupakan bukti bahwa gerakan Islam yang adaptif secara kultural memiliki daya tumbuh yang jauh lebih kuat dibandingkan gerakan yang bersifat transplantasi ideologis semata. Kompatibilitas antara nilai-nilai dakwah Muhammadiyah dengan filosofi *siri' na pacce* masyarakat Bugis-Makassar menciptakan fondasi sosial yang kokoh, yang kelak menjadi modal utama perjuangan kemerdekaan di wilayah tersebut. Tanpa fondasi kultural yang kuat ini, mobilisasi massa dalam skala besar yang dilakukan Muhammadiyah pada masa revolusi kemerdekaan tidak akan mungkin terwujud.
2. Dalam dimensi perjuangan bersenjata, kontribusi Muhammadiyah Sulawesi Selatan bersifat struktural dan terorganisir, bukan sporadis. Penerbitan fatwa jihad oleh ulama-ulama Muhammadiyah merupakan tindakan strategis yang secara sadar mengubah paradigma perlawanan dari sekadar imperatif politik menjadi kewajiban keimanan yang tidak dapat dinegosiasikan. Transformasi paradigma ini memiliki dampak psikologis yang luar biasa dalam menopang semangat juang di tengah tekanan militer yang berat. Lebih dari itu, keterlibatan kader-kader Muhammadiyah dalam berbagai laskar pejuang mencerminkan kemampuan organisasi ini untuk melampaui batas-batas kelembagaannya sendiri demi kepentingan perjuangan yang lebih besar.

3. Kecerdasan taktis Muhammadiyah Sulawesi Selatan paling nyata termanifestasi dalam jalur diplomasi dan politik. Strategi *struggle from within* yang diterapkan dalam menghadapi pembentukan Negara Indonesia Timur merupakan pilihan yang matang secara politis dan efektif secara hasil. Pilihan ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan bukan sekadar pemimpin keagamaan, melainkan negarawan sejati yang mampu membaca realitas politik secara jernih dan bertindak berdasarkan kalkulasi jangka panjang demi kepentingan integritas Republik Indonesia.
4. Kontribusi kelembagaan Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui jaringan amal usaha pendidikan, kesehatan, dan keagamaan merepresentasikan dimensi perjuangan yang paling berkelanjutan dampaknya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak hanya mencetak generasi terdidik, tetapi juga secara sistematis menanamkan kesadaran kebangsaan dan semangat kemerdekaan yang bersifat lintas generasi. Masjid dan mushola binaan Muhammadiyah berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi perjuangan yang efektif di tingkat komunitas paling bawah sebuah dimensi yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
5. Kajian tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengungkap bahwa perjuangan kemerdekaan di wilayah ini digerakkan oleh tiga lapis kepemimpinan yang saling menopang pemimpin yang menjembatani arena lokal dan nasional, ulama yang menjadi otoritas moral di akar rumput, dan pendidik yang bekerja dalam sunyi namun meninggalkan dampak paling abadi. Ketiga tipologi kepemimpinan ini membentuk ekosistem perjuangan yang holistik dan tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Najib Burhani. (2016). *Muhammadiyah Berkemajuan: Pergeseran dari Puritanisme ke Kosmopolitanisme*. Mizan.
- Aman. (2015). *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998*. Ombak.
- Ilham Hamid, F. J. (2015). *Matahari Pembaruan di Serambi Madinah: Menelusuri Tapak Sejarah Muhammadiyah Kota Makassar* (R. A. Mustari Bosra (ed.)).

- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Mizan Digital Publishing.
- Mappangara, S. (2018). *Sejarah perjuangan rakyat Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 1945–1950*. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulawesi Selatan.
- Mulkhan, A. M. (2010). *Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan*. Buku Kompas.
- Musthafa Kamal, P. & A. D. (2009). *Muhammadiyah sebagai gerakan Islam: dalam perspektif historis dan ideologis*. LPPI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mustarri Bosra. (2015). *Menapak Jejak Menata Langkah Sejarah Gerakan dan Biografi Ketua-Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan*.
- Nasir, H. (2016). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Suara Muhammadiyah.
- Ricklefs, M. C. (2018). *A history of modern Indonesia since c.1200 (5th ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Syaifullah, M., & Hamid, A. (2020). *Gerakan Islam di Sulawesi Selatan: Sejarah, peran, dan kontribusi*. Pustaka Refleksi.

Artikel

- Darmawijaya & Irwan Abbas. (2012). Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 1926-1942. *Jurnal Lektur: Penelitian Lektur Dan Keagamaan*.
- Faisal Ismail. (2020). Islam, politics and ideology in Indonesia: A study of the process of Muslim acceptance of the Pancasila. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)*, 1(2), 19–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ijiis.vol1.iss2.art2>
- Handisaputra, Damayanti, E., & Quraissy, Hidayah, L. (2022). Dinamika Gerakan Perempuan Berkemajuan di Tingkat Lokal (Sejarah ‘ Aisyiyah Sulawesi Selatan Tahun 1927-1965). *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(2), 1717–1728.
- Pelu, I. E. A., & Wahab, A. (2022). Peran organisasi Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di kawasan timur: Studi historis Sulawesi Selatan 1945–1950. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 5(1), 67–84.

Skripsi/ Tesis

- Amri, K. (2024). Kejayaan Hingga Kemerosotan Panji Bulan Bintang: Sejarah Partai Masyumi Di Sulawesi Selatan Tahun 1950. In *Disertasi Doktorat Universitas Hasanuddin*.